



Political Will Pemerintah Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Elfa Nurmala¹, Hanny Purnamasari², Sopyan Resmana Adiarsa³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 22 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

This research discusses the Political Will of the Karawang Regency Government in developing Micro, Small and Medium Enterprises. The aim of this research is to examine and analyze the extent of the political will of the Karawang Government in developing Micro, Small and Medium Enterprises in Karawang Regency. This research uses a literature review method with a qualitative approach. This research was analyzed using the political will theory expressed by Derick W. Brinkerhoff with five indicators, namely initiative, priority, political mobilization, law enforcement and business sustainability. The research results show that the political will of the Karawang Regency Government in developing Micro, Small and Medium Enterprises is quite good.

Keywords: Political Will, Micro, Small, Medium Enterprises

(*) Corresponding Author: elfanurmala2@gmail.com

How to Cite: Nurmala, E., Purnamasari, H., & Adiarsa, S. R. (2024). Political Will Pemerintah Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14306236>.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sebuah usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Menurut M. Kwartono Adi (2007:12) dalam bukunya yang berjudul Analisis Usaha Kecil dan Menengah, UMKM adalah suatu kegiatan ekonomi milik warga negara Indonesia yang memiliki laba bersih maksimal dua ratus juta rupiah atau omset paling banyak yaitu satu miliar rupiah per tahun, namun bangunan dan tanah tempat usaha tidak termasuk dalam perhitungan. Berdasarkan nilai aset dan jumlah karyawannya, Badan Pusat Statistik Indonesia mengklasifikasikan UMKM menjadi tiga level. Pertama yaitu Usaha Mikro, yakni memiliki maksimal nilai aset Rp. 50.000.000,- dengan karyawan hingga 9 orang. Kedua yaitu Usaha Kecil, yakni memiliki nilai aset dari Rp.50.000.000,- hingga Rp. 500.000.000,- dengan jumlah karyawan dari sepuluh hingga empat puluh sembilan orang. Ketiga yaitu Usaha Menengah, yakni memiliki nilai aset dari Rp. 500.000.000,- hingga Rp.10.000.000.000,- dengan jumlah karyawan dari lima puluh sampai sembilan puluh sembilan orang.

UMKM merupakan salah satu sektor usaha unggulan yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini karena kontribusinya yang cukup besar terhadap ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilansir dari ekon.go.id, kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto yaitu sebanyak 61 persen atau senilai Rp.9.580 triliun. Agar sektor tersebut dapat terus berperan dalam memajukan roda perekonomian nasional, maka perlu adanya political will dari pemerintah untuk mengembangkan sektor UMKM ini.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah strategis secara ekonomi. Hal ini dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang yang terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Karawang, angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Karawang pada tahun 2021 yaitu 5,85 persen tahun 2021 meningkat pada tahun 2022 sebesar 6,33 persen. UMKM menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Karawang. Pertumbuhan UMKM di Karawang saat ini kian bertambah. Berdasarkan data yang didapatkan, jumlah UMKM di Karawang tahun 2021 yaitu sebanyak 14.239 Unit, mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 15.410 Unit (BPS Provinsi Jawa Barat). Dalam rangka memajukan perekonomian daerah, UMKM menjadi salah satu sektor ekonomi yang diunggulkan Pemerintah Kabupaten Karawang. Sejalan dengan arahan dari Pemerintah Pusat yang menginginkan pengembangan sektor UMKM di daerah-daerah, maka Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Karawang.

Political will menurut Brinkerhoff merupakan komitmen secara politik terhadap tindakan yang dilakukan aktor politik untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori political will dari Derick W. Brinkerhoff. Teori tersebut mencakup lima indikator penting yakni : inisiatif, prioritas, mobilisasi politik, penegakan hukum dan keberlanjutan usaha. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada sejauh mana komitmen dari Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengembangkan sektor UMKM yang ada di Karawang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis political will dari Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengembangkan UMKM sehingga dapat menjadi rujukan dan bahan masukan bagi para stakeholder. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait “Political Will Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literatur review*, hal ini untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber pustaka. *Literatur review* menurut Snyder (2019:333) adalah suatu metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan mengambil esensi dari penelitian-penelitian terdahulu juga menganalisis overview dari para ahli. Menurutnya, *literatur review* merupakan landasan untuk berbagai macam penelitian, karena metode *literatur review* dapat menghasilkan pemahaman soal perkembangan suatu pengetahuan, sumber masukan untuk pembuatan kebijakan, sebagai pemantik dalam menciptakan ide baru yang bermanfaat untuk acuan penelitian pada bidang tertentu (Snyder, 2019: 339). Selain itu, peneliti juga memilih menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini karena data yang dibutuhkan peneliti yaitu dalam bentuk kata-kata. Pendekatan penelitian kualitatif adalah terkait informasi tentang suatu fenomena atau peristiwa yang dikaji dalam penelitian, subjek penelitian, dan lokasi penelitian (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam menganalisis terkait pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Karawang, perlu melihat sejauh mana political will yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengusahakannya. Berdasarkan teori dan indikator dari Brinkerhoff, mendapatkan temuan-temuan yang kemudian dianalisis secara komprehensif oleh peneliti dan dideskripsikan lebih rinci yaitu sebagai berikut :

1. Inisiatif

Inisiatif berarti adanya kesadaran untuk melakukan dan memutuskan suatu tindakan. Inisiatif disini dipahami bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki inisiatif dalam memutuskan dan melakukan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk pengembangan UMKM yang berada di wilayah Karawang. Inisiatif Pemerintah Kabupaten Karawang direalisasikan melalui penciptaan berbagai inovasi dalam mengembangkan UMKM, yaitu dengan menghadirkan berbagai program-program untuk melindungi dan memberdayakan para pelaku UMKM di Karawang.

Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang secara inisiatif mengembangkan UMKM di Karawang dengan berbagai usaha. Pertama yaitu menumbuhkan minat kewirausahaan berdasarkan karakteristik dan potensi wilayah, hal ini ditujukan untuk peningkatan motivasi wirausaha khususnya wirausaha pemula. Hal ini didasarkan pada target penciptaan wirausaha sebesar 4% dalam rangka perkembangan pembangunan ekonomi daerah. Kedua yaitu mengembangkan produk unggulan daerah, dalam hal ini Pemerintah Karawang berinisiatif ingin menjadikan produk ekonomi daerah menjadi ciri khas dari Kabupaten Karawang juga menjadi produk yang kompetitif secara eksternal. Ketiga yaitu kewirausahaan melalui penguasaan teknologi tepat guna, upaya ini dimaksudkan Pemerintah Karawang agar UMKM semakin adaptif terhadap kemajuan teknologi dan modernisasi. Keempat yaitu fasilitasi sertifikasi halal dan ijin PIRT, dalam hal ini Pemerintah Karawang memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku UMKM Karawang agar produknya bisa lebih diakui secara meluas. Kelima yaitu sertifikat hak atas tanah, dalam hal ini Pemerintah Karawang menginisiasi kebijakan tersebut supaya pelaku-pelaku UMKM memiliki jaminan sertifikat HAT yang mana salah satu manfaatnya untuk mempermudah mendapatkan akses pembiayaan pada lembaga keuangan. Dilihat dari berbagai upaya inovasi yang telah diciptakan, Pemerintah Karawang memiliki inisiatif yang tinggi untuk mengembangkan UMKM yang ada di Karawang.

2. Prioritas

Prioritas disini diartikan sebagai hal-hal fundamental yang menjadi fokus utama aktor. Pemerintah Karawang dalam rencana pembangunannya, terdapat program prioritas yang berkaitan dengan pengembangan UMKM yaitu program penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati melalui acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karawang pada tahun 2021 di Komplek Pemda Karawang bersama jajaran Forkompinda, Kepala OPD, DPRD dan instansi-instansi terkait lainnya. Program prioritas tersebut merupakan motor penggerak dari pembangunan visi-misinya selama lima tahun kedepan.

Pengembangan UMKM sebagai prioritas Pemerintah Karawang juga ditunjukkan dengan meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Karawang. Hal ini seperti data yang didapatkan peneliti berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kinerja kelmbagaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro	30	80
	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil (naik kelas)	5,0%	6,1%

Sumber : Lakip Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dari adanya upaya meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM tersebut menunjukkan bahwa adanya keseriusan dari Pemerintah Karawang dalam mengembangkan UMKM. Dalam hal ini, yang menjadi prioritas Pemerintah Karawang dalam mengembangkan UMKM yaitu mencakup penciptaan dan penguatan UMKM.

3. Mobilisasi politik

Mobilisasi politik diartikan sebagai tindakan-tindakan aktor yang dilakukan dalam rangka mempengaruhi kelompok atau individu untuk aktif berpartisipasi. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Karawang secara intensif menyuarakan dan mengajak untuk menggunakan produk asli dari UMKM Karawang, salah satunya dengan melakukan komunikasi bersama perusahaan-perusahaan di Karawang. Langkah tersebut juga direalisasikan melalui program “UMKM Goes to Mall” yaitu kolaborasi antara Pemerintah Karawang dengan pelaku UMKM dan pihak mall yang ada di Karawang. Tidak hanya itu, Pemerintah Karawang juga berhasil menggaet salah satu retail ternama milik PT. Indomarco untuk membantu akses pemasaran bagi UMKM Karawang. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 34 produk UMKM tersebut melali proses kurasi untuk memilih produk yang sesuai dengan standar retail tersebut.

Dari segi mobilisasi politik, terlihat bahwa Pemerintah Karawang tidak hanya memotivasi pelaku UMKM untuk berdaya tapi juga kepada pihak-pihak ketiga untuk terlibat aktif dalam mendukung pengembangan UMKM yang ada di Karawang. Menunjukkan bahwa Pemerintah Karawang mampu melakukan mobilisasi politik dengan mengedepankan kolaborasi antar elemen.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ini diartikan sebagai peraturan-peraturan tertulis yang diterapkan oleh aktor. Pemerintah Karawang mengoptimalkan pengembangan UMKM dengan diterapkannya peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan peraturan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Karawang telah mengeluarkan dan menerapkan beberapa regulasi. Pertama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 7 tahun 2022 tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro. Selanjutnya yaitu Peraturan Bupati Karawang nomor 21 tahun 2022 tentang penyelenggaraan program bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, pelaku Usaha Mikro dan Wirausaha Pemula.

Dari adanya peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Karawang berupaya menjamin perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM yang ada di Karawang.

Dengan begitu, keberadaan peraturan turunan yang berlaku sebagai payung hukum berbagai kebijakan dan program-program dapat memperkuat komitmen Pemerintah Karawang dalam mengembangkan UMKM.

5. Keberlanjutan usaha

Keberlanjutan Usaha memuat orientasi pada hasil yang visioner. Aspek ini diartikan sebagai upaya yang terus berkembang dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Dalam mengembangkan UMKM, Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Karawang. Hal ini karena diharapkan akan berimplikasi positif pada kekuatan dan kemandirian ekonomi masyarakat Karawang.

Mengingat saat ini Kabupaten Karawang masih memiliki sejumlah permasalahan ekonomi-sosial seperti Kemiskinan dan Penganggura yang tinggi. Dalam hal ini Pemerintah Karawang berusaha untuk terus menjaga pertumbuhan dan ketahanan UMKM Karawang yang menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi di Karawang, sehingga menjadikan pengembangan UMKM ini sebagai investasi jangka panjang Pemerintah Karawang. Sebagai jaring pengaman bagi kelangsungan UMKM yang masih aktif, Pemerintah Karawang memberikan dana insentif bantuan untuk mempertahankan UMKM yang ada di Karawang. Anggaran bantuan tersebut tercatat sebanyak dua miliar rupiah untuk pengembangan dan pembinaan bagi pelaku UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal yang mana nantinya akan berpengaruh pada kesejahteraan yang meningkat. Sehingga Pemerintah Karawang memandang perlunya menjaga kelangsungan UMKM di Karawang.

SIMPULAN

Sesuai dengan teori Political Will dari Brinkerhoff (1999) yang memiliki indikator antara lain inisiatif, prioritas, mobilisasi politik, penegakan hukum dan keberlanjutan usaha. Political Will Pemerintah Kabupaten Karawang dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah cukup baik. Dilihat dari aspek inisiatif, Pemerintah Karawang sudah cukup inisiatif untuk mengembangkan UMKM-UMKM yang ada di Karawang. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai inovasi program-program yang diciptakan Pemerintah Karawang melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dari aspek prioritas, Pemerintah Karawang sudah menjadikan pengembangan UMKM ini menjadi salah satu prioritas pembangunannya selama menjabat lima tahun kedepan. Dari aspek mobilisasi politik, Pemerintah Karawang sudah cukup mampu memotivasi para stakeholder terkait untuk terlibat aktif dalam mendukung pengembangan UMKM yang ada di Karawang. Dari aspek penegakan hukum, Pemerintah Karawang memiliki peraturan perundang-undangan untuk mendukung komitmennya dalam mengembangkan UMKM. Dari aspek keberlanjutan usaha, Pemerintah Karawang menjadikan pengembangan UMKM di Karawang ini sebagai pembangunan jangka panjang, hal ini karena mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang ada di Karawang.

SARAN

Pemerintah Karawang perlu konsisten dalam mengembangkan UMKM yang ada di Karawang. Pemerintah Karawang harus lebih gencar dalam meningkatkan kualitas UMKM yang ada melalui edukasi dan pelatihan produktivitas, pemanfaatan teknologi dan manajemen pengelolaan UMKM. Selain itu, Pemerintah Karawang juga perlu memperluas eksistensi produk UMKM Karawang dengan peningkatan fasilitas pemasaran, juga pemberian kemudahan akses pembiayaan untuk mendukung kelangsungan UMKM di Karawang agar dapat bertahan terhadap krisis dan terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. Kwartono. (2007). Analisis Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta : Andi Offset.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Karawang.
- Brinkerhoff, Derick W. (1999). Assessing Political Will for Anti-Corruption Efforts: An Analytic Framework. *Public Administration and Development*, Vol. 20, No. 3, 1999, pp. 239-253.
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Pustaka Pelajar.
- Ekon.go.id. Persentase Kontribusi Sektor Usaha terhadap Produk Domestik Bruto.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, pp. 333-339.
- Karawangkab.go.id. Pemkab Karawang Prioritaskan 3 Program Pembangunan Tahun 2022.
- Litan.antaranews.com. (2023). Pemkab Karawang berkomitmen kembangkan sektor UMKM.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang.
- Medcom.id. (2023). 180 UMKM di Kaarawang Dapat Pendampingan untuk Berkembang.
- Megapolitan.antaranews.com. (2022). Pemkab Karawang sediakan anggaran Rp2 miliar bantu UMKM di desa miskin ekstrem.